

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Efendi Jonaedi dan Rijadi Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Simanjuntak Ricardo, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Gramedia, 2023.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Wijayanta Tata, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Wijayanta Tata, dkk, *Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pembagian Harta Pailit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Wijayanta Tata dan Muhammad Bagas A.H., *Cross-Border Insolvency, Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Wijayanta Tata dan Sheva Trisanda Adistia, *Balai Harta Peninggalaan Sebagai Kurator Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Artikel Jurnal

Endarto Puri Galih Kris, 2010, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi *Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”. *Pandecta*. Volume 5. No. 2, (Juli 2010): 161-173

Hidayat Arief, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Pandecta*, Volume 8, Nomor 2, (Juli 2013): 154-169.

La Porta Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics*, Volume 58, Issues 1-2 (Cambridge 2000), 3–27. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9).

Rahman Fazlur, “Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Imbalan Jasa Kurator Jika Putusan Pailit Dibatalkan (Studi Putusan Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Selular)”, *Brawijaya Law Student Journal*, No. 1 (2014): 5-6, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/534>

Wijayanta Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14 No. 2, (2014): 216-226, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26 No. 1, (2014): 1-10.

Wijayanta Tata, Sheva Trisanda Adistia, Rado Leonardus, B.E. Hermawan, “Should Indonesia Learn from Malaysia and Singapore’s Cross-Border Insolvency Asset Settlements?”, *Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 13 No. 1, (2024): 3.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, “Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dalam Penetapan Imbalan Jasa Kurator Oleh Pengadilan Niaga Semarang (Studi Penetapan Nomor. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn.Niaga Smg jo. Nomor 10/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Smg)”, (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2024),

I Ketut Suardita, “Pengenal Bahan Hukum, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana”, (*Bahan Ajar*), Universitas Udayana, 2017.

Tata Wijayanta, “Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Publik Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan: Peluang Dan Tantangan”, (*Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Acara Perdata-Perdata Kepailitan*), Universitas Gadjah Mada, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, tanggal 21 Mei 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 365).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 15 Desember 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 31 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 September 2022.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS., tanggal 24 Maret 2022.

Wawancara Narasumber

Jimmy Hutagalung, 2025, Imbalan Jasa Pengurus Akibat Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), *Wawancara*, Jakarta, 16 Januari.

Poltak Siallagan, 2025, Imbalan Jasa Pengurus Akibat Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), *Wawancara*, Jakarta, 20 Februari.

Berita dan Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Daftar Perkara Kepailitan", http://sipp3.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/87/M1N5dHZSNm1yL1hJMDBhTWROYnBVN3k0LzNpWmpNTDIJQjAyZWt4QmNWRWs3T2ZEB3RwYnlud3BXRIVwVnh6WERiNE9qSEJYMEICNkNRR3ZmVk9Zbmc9PQ==/key/col/, (diakses pada 06 Agustus 2024).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, "Daftar Perkara Kepailitan", https://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/page/3/bU5hWTBkWC9DWWNNw51TUpmZGdJM0pzVmJieUNYR2ZkbXFTMHRqK2lmY083T0c5SWZ6TWJtMjQ0SkJyOFVYaXJ0ZmhaNUFZdE9QVHo2YVArT1ZaRnc9PQ==/key/col/2, (diakses pada 06 Agustus 2024).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, "Daftar Perkara Kepailitan", https://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/page/11/NWw5Vm95MU9BVVhKY0NfNjdsN2JKTk

- [9UeE1adlhYMjY0eXRkTmNha3JIUXhyZzJ1dmYweStPdjiIbENlaG5ETzhsZXVXRU5GTfMyZ2RXazE3N2J5c0E9PQ==/key/col/2](#), (diakses pada 06 Agustus 2024).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang, "*Daftar Perkara Kepailitan*", https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/page/12/c1R4eUIyUm5UTlBpZ0E5c3NVZDlpTEVFdlBaYnZPeC9UTHdCUGk4ZkpaVIJNTmRaWWo5V0ZSU2dGL3FRQXB0cWdRZGZXb0tEYTJpMWc3RW5qTnFFUHc9PQ==/key/col/2, (diakses pada 06 Agustus 2024).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, "*Daftar Perkara Kepailitan*", https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/page/22/UDZ5TmZxRldDOWZiSHJYeERjMDltSy8rdkMvcEJMRDBhZfQrYUdTeXpQTU95ZE5Ka2Nhejd3MTZQMTczODFVR0RZbUx6OE1WNFJWSGUxdkluY21xSFE9PQ==/key/col/2, (diakses 06 Agustus 2024).
- Waruwu Riki Perdana Raya. "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma". JDIH Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Asas%20Fiksi%20Hukum%20beranggapan%20bahwa,membebasan%20memaafkannya%20dari%20tuntutan%20hukum%20> (diakses 11 Juni 2025)